

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dalam secara besarnya berkaitan dengan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi & peningkatan pendapatan secara nasional untuk cakupan keseluruhan maupun perkapita yang mempunyai sasaran utama agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Todaro, 2006). Namun dalam banyak negara masalah yang dihadapi berkaitan dengan kesejahteraan penduduk ialah tidak dapatnya warga dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya (Sri, 2010).

Untuk menentukan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah dapat menggunakan pendapatan perkapita atau PDRB perkapita. Dengan meningkatnya PDRB perkapita daerah, mencerminkan besarnya sumber penerimaan wilayah tersebut (Thamrin, 2001). Selanjutnya infrastruktur juga berfungsi dominan terkait peningkatan pemodalan dan peningkatan wilayah capaian keikutsertaan masyarakat, beserta pemerataan hasil pembangunan (Kurniadi, 2015).

Bank Dunia (1994) membagi infrastruktur menjadi beberapa kategori, yaitu sarana dan prasarana ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Untuk Infrastruktur ekonomi meliputi kepentingan publik (air minum, telekomunikasi, gas, dan sanitasi), *public work* seperti (bendungan, jalan, dan pengairan) dan bidang transportasi seperti (jalan, pelabuhan, rel kereta, bandara, dan sebagainya). Infrastruktur sosial mencakup pusat kesehatan, pendidikan, kawasan tinggal dan

wisata seperti (lapangan, museum, taman dan lain-lain). Infrastruktur kelembagaan melingkupi, kontrol administrasi, penegakan hukum dan organisasi serta kebudayaan.

Menurut laporan *World Economic Forum (2019)* untuk kawasan ASEAN, peringkat infrastruktur Indonesia berada di peringkat 5 setelah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand pada tahun 2019, ditampilkan dalam tabel 1.1

Tabel 1.1 Peringkat Infrastuktur dan GCI Indonesia dengan ASEAN periode 2019

| No | Negara | Skor Infrastruktur | Ranking Infrastruktur Dunia | Rangking GCI Dunia |
|----|-----------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Singapura | 95,4 | 1 | 1 |
| 2 | Malaysia | 78,0 | 35 | 27 |
| 3 | Brunei | 70,1 | 58 | 56 |
| 4 | Thailand | 67,8 | 71 | 40 |
| 5 | Indonesia | 67,7 | 72 | 50 |
| 6 | Vietnam | 65,9 | 77 | 67 |
| 7 | Laos | 59,2 | 93 | 113 |
| 8 | Philipina | 57,8 | 96 | 64 |
| 9 | Kamboja | 54,9 | 106 | 106 |

Sumber: *The Global Competitiveness Report 2019*.

Tabel 1.1 menyuguhkan bahwa negara ASEAN yang mempunyai peringkat infrastruktur tinggi cenderung memiliki peringkat indeks daya saing dunia yang tinggi pula. Dalam kawasan ASEAN, Indonesia masih dikatakan lemah terkait infrsaturturnya. Oleh sebab itu, Indonesia sukar untuk bersaing dengan negara ASEAN lainnya terkait perkenomian negara.

Ketersediaan infrastruktur memiliki hubungan yang sangat kuat dengan tingkat pembangunan daerah, yang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi & kesejahteraan masyarakat (Averiana, 2013).

Daerah yang memiliki ketersediaan infrastruktur yang memadai cenderung memiliki taraf pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran ekonomi yang cukup baik daripada daerah ketersediaan infrastrukturnya terbatas (Bappenas, 2003).

Selanjutnya BPS (2020) memperlihatkan bahwa rasio jumlah siswa SMA/jumlah SMA tertinggi berada di provinsi Bali dengan rasio sebesar 560,1304 siswa/unit sekolah dan rasio jumlah siswa SMA/jumlah SMA terendah berada pada provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 206,2067 siswa/unit sekolah dengan taraf kesejahteraannya dinilai dengan PDRB per kapita sebesar Rp.37.534.000 untuk provinsi Bali dan Rp.21.171.000 untuk provinsi Maluku Utara. Untuk jenjang SMK juga memperlihatkan hasil yang sama yaitu rasio jumlah siswa SMK/jumlah SMK tertinggi berada pada provinsi Bali sebesar 584,0756 siswa/unit sekolah dan rasio jumlah siswa SMK/jumlah SMK terendah berada pada provinsi Maluku Utara sebesar 135,1727 siswa/unit sekolah dengan tingkat kesehatan yang diukur dengan PDRB per kapita sebesar Rp.37.534.000 untuk provinsi Bali dan Rp.21.171.000 untuk provinsi Maluku Utara. Untuk perguruan tinggi, rasio jumlah mahasiswa/jumlah perguruan tinggi tertinggi berada pada provinsi Banten sebesar 10674,436 mahasiswa/unit universitas dengan tingkat kesejahteraan yang diukur dengan PDRB per kapita sebesar Rp.35.431.000. Sedangkan rasio jumlah mahasiswa/jumlah perguruan tinggi terendah berada pada provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 623,833 mahasiswa/unit universitas dengan taraf kesejahteraan dinilai dengan PDRB perkapita sebesar Rp.36.238.000.

Untuk infrastruktur kesehatan, rasio jumlah dokter umum/Puskesmas tertinggi berada pada provinsi Bali sebesar 3.85 dokter umum/unit Puskesmas dan

terendah berada pada provinsi Jawa Tengah sebesar 0,002303 dokter umum/unit Puskesmas dengan tingkatan sejahtera yang dinilai berdasarkan PDRB per kapita sebesar Rp.37.534.000 untuk provinsi Bali dan Rp.28.576.000 untuk provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan publikasikan BPS (2020) terbukti bahwa provinsi yang memiliki infrastruktur yang memadai ternyata tidak serta merta mempengaruhi kesejahteraan. Dengan demikian masih terdapat hubungan yang belum jelas antara ketersediaan infrastruktur sosial dengan kesejahteraan yang diukur dengan PDRB per kapita. Oleh sebab itu perlu diteliti lagi keterkaitan antara ketersediaan infrastruktur sosial dengan kesejahteraan yang berjudul **“Pengaruh Ketersediaan Infrastruktur Sosial Terhadap Kesejahteraan di Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta yang dipublikasikan BPS (2020) provinsi yang memiliki infrastruktur yang memadai ternyata tidak serta merta mempengaruhi kesejahteraan yang diukur dengan PDRB per kapita. Maka dari itu masalah yang diangkat dalam penelitian ini bagaimana keterkaitan ketersediaan infrastruktur sosial terhadap kesejahteraan yang diukur dengan PDRB per kapita di Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dikemukakan, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa pengaruh ketersediaan infrastruktur sosial terhadap kesejahteraan di negara Indonesia

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini yaitu:

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan yang digunakan.

Bab II Landasan Teori

Terdapatnya landasan teori dalam penelitian serta penelitian yang dilakukan sebelumnya yang dijadikan pendukung penelitian yang dilakukan.

Bab III Metode Penelitian

Memuat variabel yang digunakan dalam penelitian dan definisi operasional penelitian, ragam data yang di pakai, metode analisa dan uji data yang diterapkan dalam penelitian.

Bab IV Perkembangan Kesejahteraan dan Infrastruktur

Berisi tentang perkembangan kesejahteraan dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Indonesia tahun 2015-2019

Bab V Hasil dan Pembahasan

Memuat terkait analisa data, penjelasan hasil penelitian serta bersikan pembahasan peneliti terhadap hasil penelitian.

Bab VI Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk instansi yang berkaitan dengan penelitian serta penelitian selanjutnya.